

Potret Pekerja Anak di Kelurahan Gilingan: Antara Kebijakan dan Realita Sosial

Gurun Pambudi

Universitas Sebelas Maret, gurun872@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja anak masih menjadi persoalan sosial yang bertahan di wilayah perkotaan, termasuk di Kelurahan Gilingan, Kota Surakarta. Kajian ini menganalisis fenomena pekerja anak dengan pendekatan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, khususnya konsep arena, habitus, dan modal. Di tengah berkembangnya aktivitas transportasi, jasa, dan ekonomi informal di sekitar Masjid Syekh Zayed, masih ditemukan anak usia 13–17 tahun yang bekerja sebagai juru parkir, pedagang plastik, tenaga tambahan catering, dan mekanik kendaraan ringan. Praktik ini menunjukkan bahwa ruang publik perkotaan tidak sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak, karena anak masuk dalam arena kerja informal yang minim perlindungan serta menempatkan mereka pada posisi sosial yang lemah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap anak, orang tua, serta Ketua RT/RW pada tiga RW sekitar Masjid Syekh Zayed, dengan analisis interaktif Miles dan Huberman selama November 2024. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kerja informal berkaitan dengan ketimpangan distribusi modal ekonomi dan modal budaya keluarga, diperkuat oleh modal sosial lingkungan, serta habitus yang menormalisasi kerja anak sebagai praktik yang wajar. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dan realitas sosial di tingkat lokal.

Kata kunci: *Habitus; Arena sosial, Pekerja anak, Modal ekonomi, Ketimpangan kebijakan*

1. PENDAHULUAN

Pekerja anak merupakan realitas sosial yang memperlihatkan kontradiksi antara perlindungan hak anak dan tuntutan ekonomi keluarga dalam struktur masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya mendorong anak memasuki dunia kerja pada usia yang seharusnya masih berada dalam proses pendidikan dan perkembangan. Oleh karena itu, pekerja anak menjadi salah satu persoalan sosial global yang menghambat agenda pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 138 juta pekerja anak di dunia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sekitar 2,5% anak di Indonesia terlibat dalam aktivitas bekerja. Kondisi tersebut bertentangan dengan komitmen internasional sebagaimana tertuang dalam target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 8.7 yang menegaskan pentingnya langkah-langkah efektif untuk menghapus

segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (Yudawisastra, 2025). Di Indonesia, komitmen tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pembatasan usia kerja, serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman penanggulangan pekerja anak berbasis masyarakat. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik pekerja anak. Tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi keluarga miskin masih menjadi faktor dominan yang mendorong anak memasuki sektor informal sebagai strategi mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga (Awalokita dkk., 2025).

Kontradiksi antara perlindungan hukum dan realitas sosial tersebut tampak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kelurahan ini berada pada kawasan yang strategis karena diapit oleh Terminal Tirtonadi dan Stasiun Solo Balapan serta menjadi bagian dari koridor ekonomi Joglosemar. Meskipun aktivitas ekonomi berkembang pesat, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan yang nyata. Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan tujuh anak berusia 13–17 tahun yang bekerja sebagai pedagang kantong plastik, juru parkir, tenaga tambahan catering, dan mekanik kendaraan ringan. Sebagian anak bahkan terpaksa putus sekolah untuk bekerja, sedangkan sebagian lainnya harus membagi waktu antara pendidikan dan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak serta mencegah mereka dari eksploitasi ekonomi.

Fenomena pekerja anak di Kelurahan Gilingan dianalisis menggunakan perspektif sosiologi Pierre Bourdieu melalui konsep *habitus*, modal (*capital*), dan arena (*field*). Dalam perspektif Bourdieu, praktik sosial tidak dipahami sebagai pilihan individual yang sepenuhnya bebas, melainkan sebagai hasil interaksi antara *habitus* yang terbentuk melalui pengalaman hidup, kepemilikan modal yang tidak setara, serta arena sosial tempat individu berinteraksi. Keterbatasan modal ekonomi keluarga dan rendahnya modal budaya, terutama akses terhadap pendidikan, membentuk *habitus* yang mendorong anak memasuki arena kerja sektor informal. Praktik tersebut pada akhirnya mereproduksi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara antargenerasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan sosiologis. Pertama, bagaimana potret pekerja anak di Kelurahan Gilingan dipahami melalui perspektif teori praktik Pierre Bourdieu? Kedua, bagaimana kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional dengan realitas sosial pekerja anak di Kelurahan Gilingan serta dampak yang ditimbulkannya?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji fenomena pekerja anak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Penelitian dilaksanakan pada November–Desember 2024 dengan lokasi penelitian yang difokuskan pada tiga Rukun Warga (RW) di sekitar kawasan Masjid Syekh Zayed, yang memiliki aktivitas ekonomi sektor informal cukup tinggi.

Subjek penelitian ditentukan secara purposif, yaitu individu-individu yang dianggap mengetahui dan mengalami secara langsung fenomena pekerja anak. Informan penelitian terdiri atas tiga pekerja anak, dua orang tua pekerja anak, satu Ketua RT, dan satu Ketua RW. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta didukung oleh observasi lapangan dan dokumentasi.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian (Creswell dan Creswell, 2018; xx). Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari setiap informan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian.

3. ANALISIS DATA

3.1. Potret Pekerja Anak di Kelurahan Gilingan

Fenomena pekerja anak di Kelurahan Gilingan, terutama di kawasan sekitar Masjid Syekh Zayed, stasiun, dan terminal, menunjukkan bahwa di balik perkembangan dan modernisasi kota masih terdapat ruang-ruang yang menyimpan kerentanan bagi anak usia 13–17 tahun. Keterlibatan mereka dalam berbagai pekerjaan di sektor informal, seperti menjadi juru parkir, menjual kantong plastik, membantu usaha katering, hingga bekerja sebagai mekanik, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individu. Praktik tersebut merupakan bagian dari pola sosial yang terbentuk dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, sektor informal di Gilingan dapat dipahami sebagai *field* atau arena sosial yang memiliki aturan, relasi kuasa, serta mekanisme tersendiri (Bourdieu, 2013). Arena ini tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan menjadi ruang kontestasi yang dinamis, di mana posisi para aktor ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu menavigasi struktur kekuasaan lokal. Arena sektor informal di sekitar pusat keramaian Gilingan relatif mudah dimasuki oleh anak-anak karena tidak mensyaratkan kepemilikan modal budaya formal atau institusional, seperti ijazah, sertifikasi, ataupun keterampilan khusus yang diperoleh melalui institusi pendidikan formal. Absennya batasan birokratis dan regulasi yang ketat dari negara menciptakan ilusi inklusivitas ekonomi di arena jalanan Gilingan, sehingga siapa pun tampak dapat berpartisipasi. Namun, pada kenyataannya arena tersebut memiliki mekanisme seleksi internal yang sangat rigid dan dipandu oleh aturan-aturan informal yang tidak tertulis (Bourdieu, 2013).

Sebaliknya, keberadaan anak-anak di dalam arena tersebut lebih ditentukan oleh modal sosial yang mereka miliki, seperti jaringan pertemanan, hubungan kedekatan, dan kepercayaan dari pihak-pihak yang telah lebih dahulu menguasai ruang ekonomi di jalanan. Dalam konseptualisasi Bourdieu (2013), modal sosial bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan produk dari jaringan relasi yang terus-menerus dibangun dan dilegitimasi. Posisi tawar anak dalam arena ekonomi Gilingan sangat bergantung pada sejauh mana mereka terkoneksi dengan para *gatekeeper*, seperti koordinator parkir liar atau preman lokal yang mengendalikan alokasi sumber daya di lapangan. Tanpa akumulasi modal sosial

yang memadai, berupa pengakuan dan kepercayaan dari otoritas jalanan tersebut, seorang anak tidak akan mampu mempertahankan posisinya di dalam arena, sekalipun memiliki determinasi ekonomi yang tinggi. Mekanisme rekrutmen yang bersifat informal tersebut tercermin dalam pengakuan BS (5 Desember 2024), seorang siswa yang setiap pulang sekolah langsung menuju kawasan Masjid Syekh Zayed.

"Ya mau gimana lagi, Mas, habis pulang sekolah langsung ke sini buat bantu parkir. Lumayan uangnya bisa buat jajan sendiri sama bantu ibu beli beras. Di sini enggak perlu syarat apa-apa, yang penting berani dan kenal sama mas-mas yang megang lahan parkir di sini."

Kutipan tersebut memperlihatkan secara gamblang bagaimana struktur arena jalanan menuntut anak untuk secara cepat mengonversi modal sosial berupa jaringan pertemanan menjadi modal ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Fenomena ini membuktikan bahwa dalam arena informal, modal sosial berfungsi sebagai instrumen substitusi yang krusial ketika modal budaya institusional tidak lagi relevan atau tidak dimiliki oleh aktor (Bourdieu, 2013). Kemudahan akses terhadap pekerjaan informal karena faktor jaringan ketetangaan, kemiripan nasib, dan pertemanan sebaya juga dialami oleh EPI (5 Desember 2024), yang menjual kantong plastik di sekitar terminal.

"Saya jualan kantong plastik kresek di dekat pintu masuk stasiun atau terminal kalau sedang ramai. Kadang dari siang sampai malam kalau sedang libur sekolah. Awalnya saya hanya ikut-ikutan teman. Yang penting bisa dapat uang sendiri untuk pegangan."

Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh BS dan EPI tidak terlepas dari *habitus* yang terbentuk melalui pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut Bourdieu (2013), *habitus* merupakan struktur mental yang terstruktur (*structured structures*) sekaligus berfungsi sebagai struktur yang menstrukturkan (*structuring structures*), di mana seluruh persepsi, evaluasi, dan tindakan agen dibentuk oleh kondisi objektif kelas sosial mereka. Sebagai hasil internalisasi kondisi struktur sosial yang terus berulang dan dialami secara konstan sejak usia dini, bekerja di ruang publik dipahami oleh anak-anak di Gilingan sebagai sesuatu yang biasa, wajar, dan tidak terhindarkan. *Habitus* tersebut beroperasi di bawah ambang kesadaran diskursif sebagai sistem disposisi yang tertanam kuat dalam skema kognitif anak. Akibatnya, ritme ekonomi jalanan yang keras tidak lagi diidentifikasi sebagai bentuk marginalisasi atau eksploitasi, melainkan dipandang sebagai *practical sense* atau nalar praktis yang paling logis untuk bertahan hidup di tengah himpitan kehidupan perkotaan (Bourdieu, 2013). Bagi anak-anak yang sejak kecil tumbuh di tengah hiruk-pikuk aktivitas ekonomi stasiun dan terminal, mencari penghasilan di jalanan menjadi bagian dari lanskap keseharian yang mereka lihat, internalisasi, dan pada akhirnya direproduksi melalui tindakan nyata.

Pandangan mengenai internalisasi nilai yang mengonstruksi tindakan anak-anak tersebut juga diungkapkan oleh S (23 November 2025), selaku Ketua RT setempat.

"Anak-anak di wilayah sini sejak kecil memang sudah akrab dengan hiruk-pikuk stasiun dan terminal. Bagi mereka, melihat orang dewasa atau kakak-kakaknya cari uang di jalanan itu hal biasa setiap hari. Jadi, ketika mereka menginjak remaja, ada

kecenderungan kuat untuk ikut turun ke jalan karena menganggap itulah cara hidup yang lumrah di lingkungan ini."

Melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara masif di tingkat akar rumput, pemahaman bahwa anak bekerja merupakan sesuatu yang wajar semakin diperkuat oleh pandangan masyarakat dan aparaturnya lingkungan yang bertindak sebagai agen kolektif pembentuk *habitus*. Struktur lingkungan memberikan pemaknaan normatif terhadap aktivitas kerja anak melalui narasi yang bersifat eufemistik, seperti proses pendewasaan diri, penanaman etos kerja sejak dini, atau pembentukan ketahanan mental dalam menghadapi kerasnya kehidupan (Bourdieu, 2013). Pandangan tersebut juga disampaikan oleh A (28 November 2024), selaku Ketua RW.

"Di lingkungan sini, melihat anak remaja usia SMP atau SMA membantu cari uang di luar jam sekolah itu sudah jadi pemandangan biasa. Sektor informal di sekitar stasiun dan terminal memang sangat dinamis. Warga menganggapnya sebagai bentuk kemandirian atau sekadar membantu meringankan beban orang tua, sehingga jarang ada yang menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak anak."

Legitimasi sosial dari komunitas tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari *habitus* kolektif yang tumbuh akibat tekanan eksternal pada tingkat makro, ketika ketidakmampuan negara menyediakan jaminan kesejahteraan sosial mendorong komunitas lokal membangun mekanisme pertahanan kulturalnya sendiri (Bourdieu, 2013). Di sisi lain, keberlangsungan praktik pekerja anak di Gilingan juga tidak dapat dipisahkan dari keterbatasan kondisi ekonomi keluarga. Bourdieu (2013) menegaskan bahwa tindakan seorang aktor sangat ditentukan oleh volume dan komposisi modal yang dimilikinya. Keterbatasan modal ekonomi yang ekstrem membuat pilihan strategis keluarga miskin menjadi sangat sempit. Akibatnya, keluarga menerapkan strategi bertahan hidup dengan mengorbankan waktu dan masa depan anak demi menjaga keberlangsungan konsumsi rumah tangga, sehingga anak diposisikan sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga. Kondisi tersebut disampaikan oleh NS (5 Desember 2025), salah seorang orang tua pekerja anak.

"Bukannya saya tega menyuruh anak bekerja, Mas. Tapi bapaknya cuma buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Daripada dia kelayaban tidak jelas setelah pulang sekolah, lebih baik ikut bantu-bantu. Uangnya bisa langsung dipakai untuk nambah beli lauk dan kebutuhan dapur sehari-hari."

Persoalan defisit modal ekonomi tersebut kemudian beririsan secara dialektis dengan keterbatasan modal budaya keluarga, khususnya dalam bentuk *embodied state*, yang terwujud dalam cara pandang, nilai, dan ekspektasi terhadap masa depan anak (Bourdieu, 2013). Ketika sebuah keluarga secara turun-temurun terperangkap dalam kerentanan ekonomi, rasionalitas pragmatis jangka pendek akan mendominasi setiap keputusan domestik. Dalam cara pandang kelas bawah, investasi pada modal budaya institusional, seperti pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, sering dipandang memiliki risiko kegagalan yang besar karena tidak menjamin terserapnya lulusan ke dunia kerja. Minimnya pengalaman mobilitas sosial vertikal melalui jalur pendidikan membuat keluarga lebih memprioritaskan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh secara langsung daripada berinvestasi pada pendidikan formal

yang membutuhkan biaya besar dengan hasil yang baru dirasakan dalam jangka panjang. Kondisi tersebut tergambar dalam pernyataan M (5 Desember 2025).

"Sekolah zaman sekarang itu biayanya banyak, Mas. Walaupun katanya gratis, tetap saja ada iuran ini-itu. Kalau kerja, kan, bisa bantu meringankan biayanya, bisa buat dia sendiri juga kalau butuh. Kalau cuma sekolah, ya mau makan apa, Mas? Belum tentu berhasil juga."

Pada akhirnya, keterbatasan modal ekonomi, rendahnya akumulasi modal budaya, dan pemanfaatan modal sosial yang terbatas menempatkan anak-anak di Gilingan pada posisi struktural yang paling tidak diuntungkan dalam konfigurasi arena sosial yang lebih luas (Bourdieu, 2013). Sektor informal memang menyediakan ruang bagi kelompok yang memiliki sumber daya terbatas untuk memperoleh penghasilan secara cepat. Namun, ruang tersebut tidak disertai perlindungan hukum, jaminan kesehatan, maupun regulasi keselamatan kerja yang memadai bagi anak-anak yang rentan mengalami eksploitasi. Dalam kondisi tersebut terjadi proses konversi modal yang timpang (*unequal exchange*), di mana anak-anak menukarkan waktu luang, energi pada masa tumbuh kembang, dan hak atas pendidikan demi memperoleh modal ekonomi jangka pendek yang nilainya relatif kecil. Konversi yang timpang tersebut pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk mengakumulasi modal budaya institusional berupa pendidikan formal yang lebih tinggi, yang sesungguhnya menjadi prasyarat utama bagi mobilitas sosial vertikal keluar dari lingkaran kemiskinan (Bourdieu, 2013).

Di satu sisi, keberadaan pekerja anak diterima secara permisif oleh masyarakat sebagai bagian dari dinamika kehidupan ekonomi perkotaan. Namun, di sisi lain, keterlibatan mereka dalam pekerjaan informal secara perlahan mengurangi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sekaligus menghambat peluang mobilitas sosial pada masa depan. Fenomena pekerja anak di Kelurahan Gilingan menjadi bukti empiris bahwa reproduksi ketimpangan sosial dan pelanggaran kemiskinan antargenerasi tidak selalu berlangsung melalui mekanisme yang tampak jelas, tetapi juga melalui praktik-praktik ekonomi sehari-hari yang dianggap wajar, dilegitimasi oleh *habitus* lokal, dan terus direproduksi sebagai suatu keniscayaan budaya. Dengan demikian, kota modern bukanlah ruang yang netral bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi yang setara, melainkan arena makro yang konfliktual, tempat relasi kuasa, dominasi kelas, dan asimetri modal terus diproduksi, dilegitimasi, dan dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

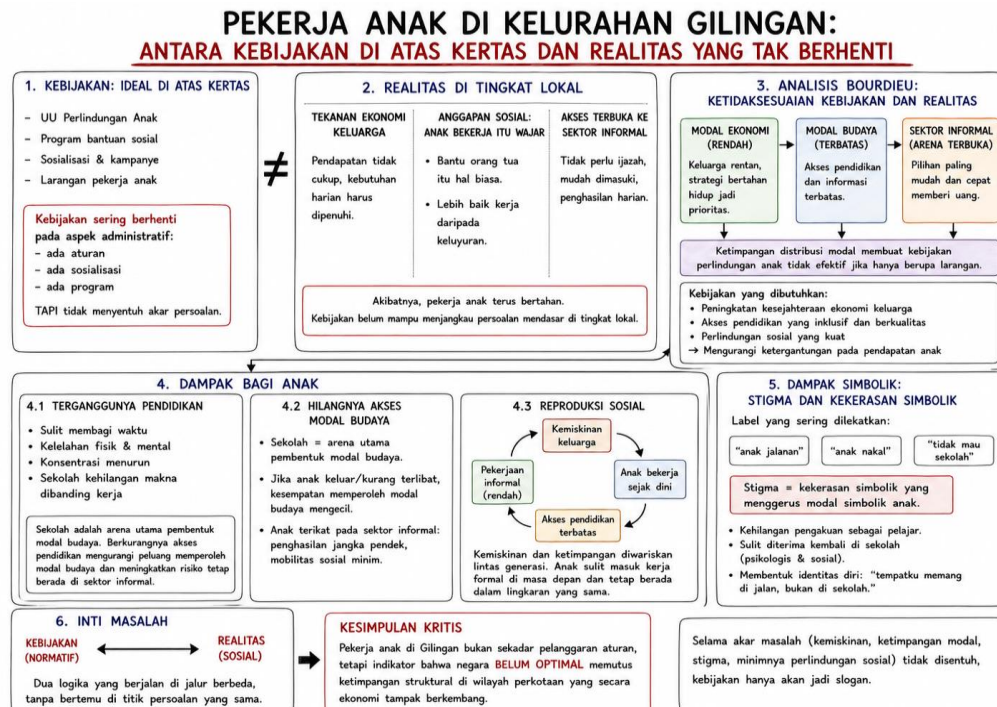
3.2. Kesenjangan Antara Kebijakan dan Realitas Sosial serta Dampak Yang Ditimbulkan.

Persoalan pekerja anak di Kelurahan Gilingan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara gagasan perlindungan anak yang tertuang dalam berbagai kebijakan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara normatif, negara telah memiliki berbagai regulasi dan program yang menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas. Namun, keberadaan regulasi tersebut tidak serta-merta mampu mengubah praktik yang berkembang di masyarakat. Kebijakan sering kali berhenti pada

aspek administratif, seperti pelarangan, sosialisasi, atau pemberian program bantuan, sementara persoalan yang dihadapi keluarga berada pada lapisan yang jauh lebih kompleks.

Dalam praktiknya, tekanan ekonomi keluarga, anggapan bahwa anak bekerja merupakan sesuatu yang wajar, serta terbukanya akses terhadap sektor informal menyebabkan praktik pekerja anak terus berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menjangkau persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal. Akibatnya, perlindungan anak lebih banyak hadir sebagai cita-cita normatif, sementara dinamika sosial di lapangan berjalan dengan logika yang berbeda.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas sosial berkaitan dengan distribusi modal yang tidak merata. Selama keluarga masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan anak belum memiliki akses yang memadai terhadap modal budaya melalui pendidikan, sektor informal akan tetap menjadi pilihan yang paling mudah dijangkau. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak tidak cukup hanya berfokus pada pelarangan pekerja anak, tetapi juga perlu disertai dengan upaya memperkuat posisi keluarga dalam arena sosial melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi, perluasan akses pendidikan yang benar-benar inklusif, serta penguatan perlindungan sosial yang mampu mengurangi ketergantungan keluarga terhadap penghasilan anak. Dalam konteks tersebut, keberadaan pekerja anak di Kelurahan Gilingan dapat dipahami sebagai salah satu indikator bahwa peran negara dalam memutus ketimpangan struktural di wilayah perkotaan yang secara ekonomi berkembang masih belum optimal.



Gambar 1. Kesenjangan Kebijakan dengan Realitas Sosial Pekerja Anak Gilingan

Kesenjangan antara kebijakan dan realitas tersebut kemudian memunculkan berbagai konsekuensi sosial bagi anak. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terganggunya

proses pendidikan akibat sulitnya membagi waktu antara bekerja dan bersekolah. Tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi melalui pekerjaan membuat anak menjalani beban ganda yang sering kali berujung pada kelelahan fisik maupun mental. Kondisi tersebut disampaikan oleh WH (2 Desember 2024).

"Sering banget capek waktu di kelas, Mas. Kadang malah ketiduran karena malamnya saya parkir sampai jam 11 malam. Tugas-tugas sekolah juga sering enggak sempat saya kerjakan karena fokusnya sudah terbagi sama kerjaan."

Kelelahan, keterbatasan waktu belajar, hingga menurunnya konsentrasi di sekolah merupakan pengalaman yang umum dialami oleh anak-anak yang bekerja. Dalam beberapa kasus, sekolah bahkan mulai kehilangan maknanya karena pekerjaan dipandang mampu memberikan manfaat yang lebih nyata dan dapat dirasakan secara langsung dalam bentuk penghasilan (Nursita, 2022). Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut menjadi persoalan yang penting karena sekolah merupakan arena utama dalam pembentukan modal budaya. Ketika keterlibatan anak dalam pendidikan mulai berkurang atau bahkan terhenti, kesempatan mereka untuk memperoleh modal budaya yang dapat meningkatkan posisi sosial pada masa depan juga semakin berkurang. Akibatnya, anak semakin terikat pada sektor informal yang menawarkan penghasilan jangka pendek, tetapi memiliki peluang mobilitas sosial yang terbatas (Nursita, 2022).

Kondisi tersebut kemudian membentuk mekanisme reproduksi sosial, yaitu proses ketika kemiskinan dan ketimpangan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Bourdieu, kelompok yang tidak memiliki akses terhadap modal ekonomi, modal budaya, maupun modal simbolik cenderung tetap berada pada posisi sosial yang sama (Bourdieu, 2013). Anak yang memasuki dunia kerja sejak usia dini memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan guna memasuki sektor kerja formal pada masa depan. Oleh karena itu, mereka berisiko tetap berada pada sektor pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang rendah. Dengan demikian, pekerja anak tidak hanya berkaitan dengan kondisi yang dihadapi saat ini, tetapi juga berhubungan dengan peluang hidup anak pada masa mendatang serta keberlanjutan ketimpangan sosial di wilayah perkotaan.

Selain berdampak pada aspek ekonomi dan pendidikan, pekerja anak juga menghadapi konsekuensi sosial yang bersifat simbolik dan sering kali kurang memperoleh perhatian. Anak-anak yang bekerja di ruang publik tidak jarang diberi label sebagai "anak jalanan", "anak nakal", atau "anak yang tidak mau sekolah". Label tersebut bukan sekadar bentuk penilaian sosial, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang bekerja melalui bahasa dan cara pandang masyarakat (Bourdieu, 2013).

Dalam teori Bourdieu, stigma tersebut memengaruhi modal simbolik yang dimiliki anak karena mereka kehilangan pengakuan sosial sebagai pelajar atau sebagai anak yang dipandang sesuai dengan norma pendidikan formal. Ketika pandangan negatif terus dilekatkan kepada mereka, proses untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sekolah menjadi semakin sulit, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Dalam jangka panjang, stigma tersebut dapat membentuk cara anak memandang dirinya sendiri. Mereka secara perlahan menerima anggapan bahwa sekolah bukan lagi ruang yang sesuai bagi mereka, sedangkan

pekerjaan di sektor informal justru menjadi ruang yang memberikan pengakuan dan rasa memiliki, meskipun pengakuan tersebut bersifat sementara dan tidak banyak mengubah posisi sosial mereka pada masa depan (Foenay, 2024).

4. KESIMPULAN

Fenomena pekerja anak di Kelurahan Gilingan menunjukkan bahwa modernisasi perkotaan tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan anak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa anak-anak usia 13–17 tahun masih terlibat dalam kerja informal di ruang publik sekitar Masjid Syekh Zayed. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan distribusi modal yang membuat sebagian keluarga berada pada posisi sosial yang rentan. Keterbatasan modal ekonomi mendorong keluarga mengambil strategi bertahan hidup, sementara lemahnya modal budaya membuat pendidikan tidak selalu dipahami sebagai jalur mobilitas sosial yang realistis. Pada saat yang sama, modal sosial di lingkungan sekitar justru mempermudah akses anak masuk ke arena kerja informal, dan habitus yang terbentuk dari kehidupan sehari-hari menjadikan kerja anak dipandang wajar serta terus direproduksi.

Dampak dari praktik ini terlihat pada terganggunya pendidikan anak, munculnya risiko eksploitasi, serta melemahnya modal simbolik akibat stigma sosial. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan kesenjangan antara kebijakan perlindungan anak dan realitas di tingkat lokal, karena regulasi belum sepenuhnya mampu menembus akar persoalan struktural yang terjadi di masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan berbasis keluarga melalui dukungan ekonomi rumah tangga rentan, pendampingan pendidikan yang lebih adaptif, serta pengawasan sektor informal yang lebih konsisten. Selain itu, penelitian lanjutan perlu menggali lebih jauh bagaimana relasi kuasa dalam arena kerja informal membentuk normalisasi pekerja anak di ruang perkotaan.

REFERENSI

- Al Muflih, M. R. dan Y. T. Wijaya. 2024. *Pekerja Anak di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022: Kondisi dan Faktor yang Memengaruhi*. (Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga Vol. 1 No. 2).
- Artini, N. L. P. A., A. Daeng, dan E. Agustiani. 2023. *Faktor-faktor Penyebab Adanya Pekerja Anak di Bawah Umur di Kota Mataram*. (Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1).
- Awalokita, S., S. Hariansah, dan C. Marhayani. 2025. *Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang*. (Jurnal Legalitas Vol. 3 No. 1). Pangkalpinang.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Data Pekerja anak di Umur 15-17 Tahun*. Jakarta.
- Bourdieu, Pierre. 2013. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge; Cambridge University Press.
- Creswell, John W. dan J. David Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California; Sage Publications.

- Foenay, E. Y., dkk. 2024. Dampak Psikologis pada Anak yang Bekerja di Bawah Umur. (Prosiding Seminar Nasional Psikologi (SINOPSI) Vol. 2). (Catatan: Penulis lebih dari 3 orang disingkat menggunakan dkk).
- International Labour Organization (ILO) & UNICEF. 2024. *Child Labour: Global estimates 2024, trends and the road forward*. New York; UNICEF/ILO.
- Khotijah, S., B. Airin, dan A. Thoriq. 2022. *Kajian Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Indonesia*. (Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 3 No. 1).
- Malik, R. dan M. U. T. Situmorang. 2024. Ketimpangan Sosial Pada Fenomena Anak Bekerja di Bawah Umur di Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara. (Jurnal Intervensi Sosial Vol. 3 No. 2).
- Nursita, L. 2022. *Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan pada Pendidikan*. (Jambura Economic Education Journal Vol. 4 No. 1).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang *Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan yang membatasi usia kerja*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.
- Yudawisastra, H. G. 2025. *Buku Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Bandung; Penerbit Widina